



KR GROUP
http://www.krjogja.com

Kedaulatan Rakyat

Suara Hati Nurani Rakyat

Terbit Sejak 27 September 1945



BERLANGGANAN
SCAN BARCODE



SABTU KLIWON

3 FEBRUARI 2024 (22 REJEB 1957 / TAHUN LXXIX NO 126)

HARGA RP 4.000 / 16 HALAMAN

BANYAK KRITIK DARI KAMPUS Sultan: Tinggal Bagaimana Pemerintah Menanggapi

YOGYA (KR)

- Sejumlah kampus negeri dan swasta di DIY dalam beberapa hari terakhir menyampaikan kritik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan di luar daerah, kritikan tajam terhadap Pemerintah juga disampaikan sejumlah akademisi dari berbagai Perguruan Tinggi. Kritik tersebut disampaikan karena mereka menilai ada hal-hal menyimpang dari prinsip-prinsip moral, demokrasi, kerakyatan, serta keadilan sosial.

Saat dimintai tanggapannya terhadap kondisi tersebut, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X tidak terlalu banyak memberikan komentar. Sultan mengaku tidak permasalahan beberapa kampus di DIY secara terang-terangan menyatakan kritik terhadap pemerintahan Jokowi. Karena hal tersebut sepenuhnya menjadi ranah atau kewenangan dari masing-masing kampus.

"Kalau soal itu ya tidak apa-apa, karena hal itu adalah urusan akademisi, jangan tanya saya. Itu kan otonom, ya terserah saja, as-



KR-Riyana Ekawati
Sri Sultan HB X

pirasi mereka kok, demokratisasi kok," kata Sultan Hamengku Buwono X di Kepatihan, Yogyakarta, Jumat (2/2).

Menurut Sultan, kritik merupakan bagian dari demokrasi. Selain itu, kampus memiliki hak otonomi masing-masing dan berhak menyampaikan pendapatnya. Tentunya Pemerintah harus merespons berbagai kritik tersebut secara terbuka.

"Sekarang tinggal bagaimana Pemerintah menanggapi, terbuka saja, tidak usah takut," ucap Sultan. Akademisi dari UGM dan UII secara terang-terangan menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi bangsa Indonesia saat ini. Belakangan, beberapa kampus lainnya juga menyuarakan hal tidak jauh berbeda. Mereka mengungkapkan keprihatinan sekaligus kekecewaan terhadap manuver politik yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam petisi ini mereka menyoroti penyimpangan demokrasi yang dilakukan Presiden Jokowi yang juga merupakan lulusan UGM tersebut. (Ria) -d

Seruan Alumni UI dan Forum Rektor PTMA Pelaksanaan Pemilu Bebas Intimidasi

JAKARTA (KR)

Seruan keprihatinan dari kalangan perguruan tinggi (PT) terus bergulir. Jumat (2/2) giliran sivitas akademika yang terdiri warga dan alumni Universitas Indonesia (UI) membacakan seruan kebangsaan yang meminta pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) bebas dari segala bentuk intimidasi.

"Berdasarkan ruh kebebasan akademik yang kami punya, kami berdiri di sini mengajak warga dan alumni UI dan juga seluruh warga Indonesia untuk segera merapatkan barisan. Pertama, mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi," kata Ketua Dewan Guru Besar UI Harkristuti Harkrisnowo di UI Depok Jawa Barat, kemarin.

Selain tanpa intimidasi, mereka meminta hak pilih rakyat dalam pemilu dapat dijalankan tanpa ketakutan, sehingga pemilu bisa berlangsung secara jujur dan adil.

Sementara itu, Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah (PTMA) yang berjumlah 172 berharap Pemilu 14



KR-Antara/Yulus Satria Wijaya

Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia Harkristuti Harkrisnowo (kedua kanan depan) serta jajaran sivitas akademika saat menyampaikan Deklarasi Kebangsaan Kampus Perjuangan di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Jumat (2/2/2024).

Februari 2024 momentum untuk melakukan kontrak politik antara rakyat dengan calon pemimpin atau elite politik baru.

Ketua Umum Forum Rektor PTMA Prof Dr Gunawan Budiyanto ketika membacakan Pernyataan

Sikap Forum 'Awasi Pemilu dan Tegakkan Asas Luber Jurdil untuk Pemilu Bermartabat' di Gedung Pascasarjana Kampus UMY, Jumat menyebutkan, pernyataan sikap berisi 6 butir itu ditandatangani Ketua Forum dan

Sekretaris Umum Prof Dr Ma'mun Murod Al-Barbasy. Pernyataan sikap disampaikan menjelang diskusi publik dengan Bawaslu.

Forum Rektor PTMA menyatakan, dengan melibatkan sivitas akademika

seluruh kampus PTMA akan melakukan pengawasan sekaligus pengawasan terhadap jalannya pemilu. Sejak proses masa kampanye pemilu hingga penghitungan dan penetapan suara di KPU.

* Bersambung hal 7 kol 5

Analisis Paradoks Pilpres

Indra Tranggono



PILPRES mengandung paradoks. Ia bisa membahayakan rakyat tapi juga bisa membahayakan rakyat. Membahayakan, jika ia mampu memberikan makna dan nilai signifikan pada rakyat. Yakni nilai-nilai pembebasan yang meninggikan eksistensi rakyat. Turunannya adalah terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat.

Rakyat merasa bahagia menjalani pesta demokrasi jika tidak mengalami tekanan eksternal dalam menentukan pilihan. Tekanan itu bisa muncul dari para aktor struktural yang mengarahkan rakyat pada pilihan tertentu. Wujudnya bisa berupa ancaman berbagai sanksi : dicabutnya bantuan sosial, ancaman fisik, tekanan psikologis, pengucilan dan lainnya. Adapun ancaman lain yang merendahkan martabat rakyat adalah suap, politik uang, politik sembako dan lainnya yang bisa datang dari berbagai kelompok kepentingan.

Namun pilpres justru membahayakan, jika ia sekadar dijadikan piranti untuk memburu kekuasaan dengan mengandalkan power penuh kekerasan fisik dan non-fisik untuk menguasai rakyat. Korban pun berjatuhan. Ketika hal ini terjadi, maka prinsip epemilu damai atau pemilu bermartabat tak lebih slogan rapuh dan kosong.

* Bersambung hal 7 kol 1

TERIMA SK PRESIDEN, LANGSUNG BERTUGAS Tito Karnavian Jadi Plt Menko Polhukam

JAKARTA (KR) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengumumkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) definitif, menyusul pengunduran diri Mohammad Mahfud MD dari jabatan tersebut. Sambil menunggu keputusan Presiden soal siapa pengganti Mahfud, tugas dan fungsi Menko Polhukam untuk sementara waktu dijalankan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang telah ditunjuk Presiden sebagai Plt Menko Polhukam.

"Tentu Presiden (Jokowi) akan segera menyampaikan siapa yang akan menjadi Menko Polhukam definitif," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwiipayana di Jakarta, Jumat (2/2).

Tito akan langsung menjalankan tugas di Kemenko Polhukam mulai Jumat, sesuai Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2024 yang ditandatangani Jokowi. "Langsung menjalankan tugas, agar roda



KR-Antara/Dedy Azi
Tito Karnavian

penyelenggaraan pemerintahan termasuk apa yang menjadi tugas pokok dari Kemenko Polhukam bisa berjalan," tutur Ari.

Ketika ditanya soal kualifikasi pengganti Mahfud MD, Ari menegaskan bahwa hal tersebut sepenuhnya hak prerogatif Presiden. "Ya nanti kita tunggu (arahan) dari Bapak Presiden," katanya.

Presiden Jokowi mengaku membutuhkan waktu beberapa hari ke depan untuk memutuskan pengganti Mahfud MD. "Belum. 'Kan masih kemarin sore menyerahkan surat pengunduran diri. Beri waktu sehari, dua hari, tiga hari lah," katanya usai menghadiri pembukaan Kongres XVI GP Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Jumat (2/2).

Ketika ditanya latar belakang pengganti Mahfud dari kalangan profesional atau kader partai, Presiden menyatakan sosoknya belum diputuskan.

* Bersambung hal 7 kol 1

DEBAT PUTARAN TERAKHIR KPU Tambah Waktu di Segmen Enam

JAKARTA (KR) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal menambah waktu segmen keenam dalam debat kelima atau debat terakhir yang mempertemukan antar-capres menjadi 4 menit dari semula 2 menit.

Anggota KPU RI August Mellaz mengatakan, keputusan tersebut ditetapkan usai menerima usulan dari tim sukses masing-masing pasangan capres/cawapres dalam rapat evaluasi terakhir dan rapat koordinasi.

"Kami sudah kelola itu dan kami sudah atur, kemudian nanti khusus di segmen keenam atau penutup, alokasi waktu untuk closing statement (pernyataan penutup) dari masing-masing calon presiden akan dipenuhi sebanyak 4 menit masing-masing pasangan calon," kata Mellaz di Gedung KPU, Jumat (2/2).

Mellaz mengatakan, perubahan waktu tersebut tidak mengubah waktu debat secara keseluruhan, sehingga total waktu pelaksanaan tetap 120 menit. "Kalau dari sisi waktu, yang kita concise (ringkas) itu dari sisi moderatonya. Jadi, tidak mengurangi keseluruhan alur debat," jelas Mellaz.

Sementara itu, Mellaz mengatakan, penambahan waktu dalam debat capres/cawapres bukanlah hal baru. "Sebenarnya kalau penambahan waktu ini bukan satu hal yang baru. Di pelaksanaan debat pemilu periode 2019 lalu juga sebenarnya ada. Itu juga bagian dari pengalaman-pengalaman yang ada," ujarnya.

* Bersambung hal 7 kol 5

JADWAL SALAT	Zuhur	Asar	Magrib	Isya	Subuh
	11:56	15:13	18:08	19:21	04:20

Sabtu, 3 Februari 2024 Sumber: Kementerian Agama Kanwil Provinsi DIY

DIBANDING PEMILU LALU Hoaks Politik Meningkat

JAKARTA (KR) - Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) mencatat hoaks soal politik pada 2023 terjadi sebanyak 1.292 kasus, lebih banyak dibandingkan hoaks sejenis pada musim Pemilu 2019 sebanyak 644 kasus.

Ketua Presidium Mafindo Septiaji Eko Nugroho mengatakan, konten hoaks berbentuk video mendominasi jumlah kasus tersebut. Menurutnya konten hoaks berupa video menjadi tantangan besar bagi ekosistem periksa fakta.

"Konten hoaks video cepat sekali viral karena sering dibumbui dengan elemen yang emosional. Sedangkan upaya periksa fakta konten video membutuhkan proses yang lebih lama ketimbang foto atau teks," kata Septiaji Eko Nugroho dalam keterangan di Jakarta, Jumat (2/2).

Sejauh ini, Septiaji menyampaikan, Mafindo menemukan 2.330 kasus hoaks selama tahun 2023 dengan hoaks politik sebanyak 1.292 kasus, 645 di antaranya adalah hoaks terkait Pemilu 2024.

Dikemukakan, platform YouTube menjadi tempat ditemukan hoaks terbanyak, sejumlah 44,6 persen, kemudian diikuti Facebook 34,4 persen, Tiktok 9,3 persen, Twitter atau X 8 persen, WhatsApp 1,5 persen, dan Instagram 1,4 persen.

* Bersambung hal 7 kol 5

KEPALA BAPANAS IKUT DIPERIKSA

Rumah Mewah Mantan Mentan SYL Disita KPK

JAKARTA (KR) - Penyidikan dilakukan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap satu unit rumah mewah milik mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) di Jakarta Selatan. Tim penyidik juga memasang plang segel agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Langkah ini menjadi bagian penting dalam upaya KPK melakukan aset recovery dari hasil korupsi. Tim penyidik, kemarin telah selesai melakukan penyitaan satu unit rumah yang diduga milik tersangka SYL yang berada di wilayah Jakarta Selatan," jelas Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Jumat (2/2). Ali mengatakan, KPK

masih terus melakukan penyidikan terhadap aset-aset lainnya yang diduga berasal dari tindak pidana

korupsi. KPK melibatkan juga peran aktif dari Tim Aset Tracing dari Direktorat Pelacakan Aset Pe-

ngelolaan Barang Bukti dan Eksekusi KPK. "Jadi, sampai saat ini tim penyidik masih terus melaku-

kan penelusuran aset-aset bernilai ekonomis lainnya," tuturnya.

* Bersambung hal 7 kol 1



KR-Antara/HO-KPK
Dokumentasi rumah mewah milik mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang disita KPK.

SUNGGUH SUNGGUH TERJADI

● BARU-BARU ini Pak Deli Antonius, teman saya di Paguyuban Penggemar TTS Kaki Langit Yogyakarta, dolan ke rumah temannya dan diberi kelengkapan hasil panen, cukup banyak. Beliau dipesan agar kelengkapan itu disimpan dulu sampai benar-benar matang. Setelah disimpan tiga hari, ternyata kelengkapan itu malah lumut. (Efiyati, Temon RT 21 RW 10 Temon Wetan, Kulonprogo)-f